

### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI 2

JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710

TELEPON: (021) 3994230 (20 SALURAN) PSW 5200,5204, (021) 3450959, 3865130 FAKSIMILI: (021) 3846402

SITUS: www.djpbn.kemenkeu.go.id

## PENGUMUMAN NOMOR PENG- 1 /PB/2018

#### **TENTANG**

# PELAKSANAAN SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERIODE III TAHUN 2018

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017, Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan melaksanakan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Periode III Tahun 2018 melalui mekanisme sebagai berikut:

#### A. SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN

I. Mekanisme pengakuan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara dan/atau Sertifikat Profesi Bendahara

Bagi calon peserta yang menduduki jabatan Bendahara dan yang tidak sedang menduduki jabatan Bendahara:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
- b. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- c. Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan
- d. Memiliki salah satu dari sertifikat sebagai berikut:
  - Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan sebelum tanggal 20 Januari 2016;
  - Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya sebelum tanggal 20 Januari 2016;
  - Sertifikat Profesi Bendahara yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebelum tanggal 20 Januari 2016.
- II. Mekanisme Ujian Sertifikasi Internet-based Test (IBT)

Bagi Bendahara dengan masa kerja paling singkat selama 2 tahun:

 a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);

- b. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- c. Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan
- d. Telah memiliki sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan oleh lembaga diklat selain BPPK atau sertifikat profesi Bendahara yang masih berlaku namun tidak dapat diakui dan diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register, atau tidak memiliki sertifikat diklat bendahara atau sertifikat profesi bendahara yang masih berlaku.

### III. Mekanisme Ujian Sertifikasi Computer-based Test (CBT) yang terintegrasi dengan Penyegaran (Refreshment)

Bagi Bendahara dengan masa kerja kurang dari 2 tahun :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
- b. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- c. Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan
- d. Telah memiliki sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan oleh lembaga diklat selain BPPK atau sertifikat profesi Bendahara yang masih berlaku namun tidak dapat diakui dan diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register, atau tidak memiliki sertifikat diklat bendahara atau sertifikat profesi bendahara yang masih berlaku.

### IV. Mekanisme Ujian Sertifikasi Computer-based Test (CBT) yang terintegrasi Diklat Bendahara

Bagi Calon Bendahara yang tidak sedang menduduki jabatan Bendahara :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
- b. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- c. Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan
- d. Pendaftaran dilakukan **hanya melalui BPPK** selaku penyelenggara diklat dan ujian sertifikasi secara kolektif oleh masing-masing kementerian / lembaga.

### **B. TATA CARA PENDAFTARAN**

- Pendaftaran Sertifikasi Bendahara dilakukan di Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) mulai tanggal 2 sampai dengan 31 Juli 2018.
- Pelaksanaan ujian sertifikasi bendahara dilakukan di Unit Pelaksana Sertifikasi pada bulan Agustus 2018.
- Tata cara pendaftaran Sertifikasi Bendahara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017.
- 4. Calon peserta sertifikasi bendahara **wajib** membaca peraturan sebagaimana dimaksud angka 3.
- 5. Format surat usulan nama calon peserta sertifikasi bendahara dan dokumen lainnya yang terkait dengan pendaftaran Sertifikasi Bendahara dapat diperoleh di UPS atau diunduh melalui situs <a href="http://www.djpbn.kemenkeu.go.id">http://www.djpbn.kemenkeu.go.id</a>.

- 6. Pengisian surat usulan nama calon peserta sertifikasi bendahara dan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dilakukan sesuai dengan petunjuk pengisian.
- 7. Adapun ketentuan dan dokumen persyaratan pendaftaran yang perlu disampaikan pada UPS adalah sebagai berikut:
  - 1) Persyaratan Umum
    - a) Surat usulan nama calon peserta sertifikasi dari kepala satuan kerja; dan
    - b) Softcopy pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah dalam format JPG.

### 2) Persyaratan Tambahan

- a) Softcopy sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan oleh BPPK yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian bagi calon peserta yang memiliki sertifikat diklat dimaksud, dengan format PDF;
- Softcopy sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan oleh lembaga diklat lainnya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian bagi calon peserta yang memiliki sertifikat diklat dimaksud, dengan format PDF; dan/atau
- c) Softcopy sertifikat profesi bendahara yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian bagi calon peserta yang memiliki sertifikat profesi dimaksud, dengan format PDF.
- 8. UPS melakukan verifikasi data calon peserta melalui Aplikasi SIMSERBA dengan alamat http://simserba.kemenkeu.go.id
- Dalam hal data calon peserta yang telah sesuai, UPS menerbitkan dan menyampaikan username dan password Aplikasi SIMSERBA kepada calon peserta melalui Aplikasi SIMSERBA.
- Dalam hal data calon peserta tidak sesuai, UPS mengembalikan surat usulan kepada kepala satker.
- 11. Calon peserta yang telah memperoleh *username* dan *password* Aplikasi SIMSERBA merekam data diri dan mengunggah *softcopy* dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 6 melalui Aplikasi SIMSERBA.
- 12. UPS melakukan verifikasi data terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta melalui Aplikasi SIMSERBA.
- 13. UPS menyampaikan hasil verifikasi data calon peserta sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada Unit Penyelenggara.
- 14. Calon peserta dapat melihat status pendaftaran, mekanisme sertifikasi yang diikuti, dan lokasi ujian melalui Aplikasi SIMSERBA.

### C. UNIT PELAKSANA SERTIFIKASI (UPS)

Daftar Unit Pelaksana Sertifikasi adalah sebagai berikut:

No.	Provinsi	UPS	
1.	Aceh	KPPN Banda Aceh	
	2. 2000 pm 27.	2. KPPN Lhokseumawe	
		3. KPPN Meulaboh	
		4. KPPN Langsa	
		5. KPPN Tapaktuan	
		6. KPPN Kutacane	

			7. KPPN Takengon
9	2.	Sumatera Utara	1. KPPN Medan I 2. KPPN Medan II 3. KPPN Tebingtinggi 4. KPPN Pematang Siantar 5. KPPN Padang Sidempuan 6. KPPN Tanjung Balai
			<ul><li>7. KPPN Gunung Sitoli</li><li>8. KPPN Rantau Prapat</li><li>9. KPPN Sibolga</li><li>10. KPPN Sidikalang</li><li>11. KPPN Balige</li></ul>
	3.	Sumatera Barat	<ol> <li>KPPN Padang</li> <li>KPPN Bukittinggi</li> <li>KPPN Solok</li> <li>KPPN Lubuk Sikaping</li> <li>KPPN Sijunjung</li> <li>KPPN Painan</li> </ol>
	4.	Riau	<ol> <li>KPPN Pekanbaru</li> <li>KPPN Dumai</li> <li>KPPN Rengat</li> </ol>
a	5.	Kepulauan Riau	KPPN Tanjung Pinang     KPPN Batam
	6.	Jambi	<ol> <li>KPPN Jambi</li> <li>KPPN Bangko</li> <li>KPPN Sungai Penuh</li> <li>KPPN Muara Bungo</li> <li>KPPN Kuala Tungkal</li> </ol>
	7.	Sumatera Selatan	<ol> <li>KPPN Palembang</li> <li>KPPN Baturaja</li> <li>KPPN Lahat</li> <li>KPPN Sekayu</li> <li>KPPN Lubuk Linggau</li> </ol>
	8.	Bandar Lampung	<ol> <li>KPPN Bandar Lampung</li> <li>KPPN Metro</li> <li>KPPN Kotabumi</li> <li>KPPN Liwa</li> </ol>
us.	9.	Bengkulu	<ol> <li>KPPN Bengkulu</li> <li>KPPN Curup</li> <li>KPPN Mukomuko</li> <li>KPPN Manna</li> </ol>
	10.	Bangka Belitung	<ol> <li>KPPN Pangkal Pinang</li> <li>KPPN Tanjung Pandan</li> </ol>
	11.	Banten	<ol> <li>KPPN Serang</li> <li>KPPN Tangerang</li> <li>KPPN Rangkasbitung</li> </ol>
	12.	DKI Jakarta	<ol> <li>KPPN Jakarta I</li> <li>KPPN Jakarta II</li> <li>KPPN Jakarta III</li> <li>KPPN Jakarta IV</li> <li>KPPN Jakarta V</li> <li>KPPN Jakarta VI</li> <li>KPPN Jakarta VII</li> </ol>
	13.	Jawa Barat	<ol> <li>KPPN Bandung I</li> <li>KPPN Bandung II</li> <li>KPPN Bekasi</li> <li>KPPN Bogor</li> </ol>

		5. KPPN Sukabumi
		6. KPPN Cirebon
		7. KPPN Tasikmalaya
		8. KPPN Kuningan
		9. KPPN Purwakarta
		10. KPPN Garut
		11. KPPN Karawang
		12. KPPN Sumedang
4.4	Jawa Tangah	KPPN Semarang I
14.	Jawa Tengah	
		2. KPPN Semarang II
		3. KPPN Surakarta
		4. KPPN Pati
		5. KPPN Kudus
		6. KPPN Pekalongan
		7. KPPN Tegal
		KPPN Purwokerto
		9. KPPN Magelang
		10. KPPN Klaten
		11. KPPN Sragen
		12. KPPN Purworejo
		13. KPPN Purwodadi
		14. KPPN Banjarnegara
		15. KPPN Cilacap
15.	D.I. Yogyakarta	KPPN Yogyakarta
15.	D.I. Togyakarta	KPPN Wonosari
		3. KPPN Wates
10	Jave Timers	
16.	Jawa Timur	The state of the s
		KPPN Surabaya II     KPPN Sideoria
		3. KPPN Sidoarjo
		4. KPPN Malang
		5. KPPN Pamekasan
		6. KPPN Bondowoso
		7. KPPN Madiun
		8. KPPN Kediri
		9. KPPN Blitar
		10. KPPN Mojokerto
		11. KPPN Jember
		12. KPPN Bojonegoro
		13. KPPN Banyuwangi
		14. KPPN Tuban
		15. KPPN Pacitan
17.	Kalimantan Barat	KPPN Pontianak
1 6 6	, aminariari barat	KPPN Singkawang
		3. KPPN Sanggau
		KPPN Ketapang
		5. KPPN Sintang
		6. KPPN Putussibau
40	Volimentan Tanash	
18.	Kalimantan Tengah	KPPN Palangkaraya     KPPN Puntak
		2. KPPN Buntok
		KPPN Pangkalan Bun     KPPN Pangkalan Bun
		4. KPPN Sampit
19.	Kalimantan Selatan	KPPN Banjarmasin
		2. KPPN Tanjung
		3. KPPN Barabai
		4. KPPN Pelaihari
		5. KPPN Kotabaru

20.	Kalimantan Timur	KPPN Samarinda
		2. KPPN Balikpapan
		KPPN Tanjung Redeb
21.	Bali	KPPN Denpasar
		2. KPPN Singaraja
		3. KPPN Amlapura
22.	Nusa Tenggara Barat	KPPN Mataram
		<ol><li>KPPN Bima</li></ol>
		3. KPPN Selong
		KPPN Sumbawa Besar
23.	Nusa Tenggara	KPPN Kupang
	Timur	KPPN Waingapu
		3. KPPN Ruteng
		4. KPPN Atambua
		5. KPPN Larantuka
		6. KPPN Ende
24.	Sulawesi Selatan	KPPN Makassar I
		KPPN Makassar II
		KPPN Pare-Pare
		4. KPPN Palopo
		5. KPPN Bantaeng
		6. KPPN Sinjai
		7. KPPN Benteng
		KPPN Watampone     KPPN Makale
25	Culcurati Barat	
25.	Sulawesi Barat	KPPN Mamuju     KPPN Majene
26.	Sulawesi Tengah	KPPN Palu
20.	Sulawesi Teligali	2. KPPN Poso
		3. KPPN Luwuk
		4. KPPN Tolitoli
27.	Sulawesi Tenggara	KPPN Kendari
21.	Odlawesi Teriggara	2. KPPN Bau-Bau
		3. KPPN Raha
		4. KPPN Kolaka
28.	Gorontalo	KPPN Gorontalo
20.	Coronialo	2. KPPN Marisa
29.	Sulawesi Utara	1. KPPN Manado
_0.		KPPN Kotamobagu
		3. KPPN Bitung
		4. KPPN Tahuna
30.	Maluku Utara	KPPN Ternate
		2. KPPN Tobelo
31.	Maluku	1. KPPN Ambon
		2. KPPN Masohi
		3. KPPN Tual
		4. KPPN Saumlaki
32.	Papua Barat	KPPN Manokwari
		2. KPPN Sorong
		3. KPPN Fak-Fak
33.	Papua	KPPN Jayapura
		2. KPPN Merauke
		3. KPPN Biak
		4. KPPN Serui
		5. KPPN Nabire
		6. KPPN Wamena

		7. KPPN Timika
34.	Kalimantan Utara	KPPN Tanjung Selor
		2. KPPN Tarakan
		<ol><li>KPPN Nunukan</li></ol>
35.	Badan Pendidikan	Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
	dan Pelatihan	2. BDK Cimahi
	Keuangan	3. BDK Yogyakarta
		4. BDK Malang
		5. BDK Denpasar
		6. BDK Manado
		7. BDK Makasar
		8. BDK Balikpapan
		9. BDK Palembang
		10. BDK Pekanbaru
		11. BDK Medan

### D. PENGUMUMAN HASIL SERTIFIKASI BENDAHARA

Informasi pengumuman hasil sertifikasi bendahara dapat dilihat pada Unit Pelaksana Sertifikasi dan situs http://www.djpbn.kemenkeu.go.id.

### E. LAIN-LAIN

- 1. Penerbitan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register bagi peserta yang telah memenuhi syarat akan dilakukan oleh Unit Penyelenggara.
- 2. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan proses pendaftaran, calon peserta dapat menghubungi Sekretariat Unit Penyelenggara Sertifikasi Bendahara melalui telepon: (021) 3846822 atau e-mail: sertifikasi.bendahara@kemenkeu.go.id atau Unit Pelaksana Sertifikasi setempat.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2018

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan KUNNGAN Pektur Sistem Perbendaharaan,

VIENG HANDAYANINGSIH

202161984012001